

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI X
JANUARI 2017

**MELINDUNGI INFRASTRUKTUR
KRITIS NASIONAL DARI
SERANGAN CYBER:**

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN
KETAHANAN NASIONAL**

■ **ANALIS KEBIJAKAN SETJEN WANTANNAS MERAHAIH
BEST PAPER AWARD PADA FOURTH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ACEC 2016 DI ROMA, ITALIA**

BANJIR HOAX HUJAN KEBENCIAN ■

Sesjen Wantannas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo

SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Sallom

Memasuki gerbang kehidupan di tahun baru, tentunya ada harapan dan keinginan kita di tahun baru yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Semoga di Tahun Baru 2017 ini semua cita-cita, asa dan harapan juga keinginan terwujud. Rasa syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan tahun yang baru, sehingga kita bisa introspeksi diri mengenai hal-hal yang harus diperbaiki.

Terlepas dari itu, perayaan Tahun Baru menimbulkan pro dan kontra. Harus diakui perayaan pergantian tahun merupakan *moment* yang spesial bagi mayoritas masyarakat karena pada saat itulah timbul rasa bersyukur kepada Sang Khalik yang telah memberi kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di lebih lama lagi. Namun, tidak sedikit yang memanfaatkan *moment* sebagai ajang pesta pora dan huru-hara serta melampiaskan kebebasan.

Tahun 2016 sudah dilalui bangsa ini dengan beberapa apresiasi yang diberikan kepada pemerintah atas kemampuan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya perekonomian global. Presiden Joko Widodo mengemukakan, pada 2017 ini pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan.

Hal lain yang saat ini menjadi mimpi dan keinginan masyarakat Indonesia adalah terciptanya negara yang aman tenang serta tidak banyak gejolak. Sudah cukup lama rakyat Indonesia disuguhkan drama politik yang panjang dan seakan tiada akhir. Kehadiran politik telah membawa pengaruh di hampir seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia walaupun bagi kaum *grass root* dianggap tak memperbaiki kehidupan mereka. Kebutuhan mendasarlah yang lebih diinginkan oleh mayoritas masyarakat, bukan suasana dan kepentingan yang tidak berpengaruh baik bagi kehidupan mereka.

Tahun 2017 dianggap sebagian orang sebagai tahun politik. Namun, oleh sebagian lagi dianggap tidak penting. Rakyat Indonesia akan lebih banyak berharap semoga tahun 2017 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga negara hadir sebagai penolong dan pelindung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lupakanlah asa yang tak tercapai di tahun 2016. Semangatlah dan penuh optimisme ditahun 2017.

REDAKSI



Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



MELINDUNGI INFRASTRUKTUR
KRITIS NASIONAL DARI
SERANGAN CYBER:

4 PERSPEKTIF KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL



7 Tantangan di Tahun 2017

TAJUK UTAMA



8 Banjir HOAX Hujan KEBENCIAN

PROFIL



13 DR. Ir Hendri Firman Windarto, M.Eng Sosok Peneliti di Setjen Wantannas

KEBIJAKAN PEMERINTAH



15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60/2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP

INFO KITA



17 Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional



19 ANALIS KEBIJAKAN SETJEN WANTANNAS RAIH BEST PAPER AWARD PADA FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTING, ELECTRONICS AND COMMUNICATION 2016 DI ROMA, ITALIA

Inspirasi Bulan Ini



Semut sering dianggap sepele oleh manusia. Mungkin karena tubuhnya yang kecil mungil atau karena tingkahnya yang dianggap sering mengganggu dan merugikan. Padahal jika kita cermati banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan binatang yang senang dengan benda “manis-manis” ini. Jadi kalo kita sering disamperin semut bisa jadi kita tergolong mahluk manis he..he..

Ada beberapa perilaku semut yang bisa kita contoh yaitu:

1. Semut tidak pernah berhenti sebelum sampai ke tujuan

Semut selalu berjalan mencari makan walaupun jalannya terkadang terhambat oleh rintangan. Terkadang ada benda yang menghalangi jalannya, dia tidak akan mundur atau berhenti. Semut akan mencari alternatif lain. Bisa memutar, memanjat atau masuk ke dalam lubang. Kita bisa coba sendiri menghalangi jalan semut dengan tangan. Semut akan langsung mencari jalan lain.

2. Semut selalu “bertegur sapa” ketika bertemu dengan semut lainnya.

Coba kita perhatikan semut yang sedang berjalan, ketika bertemu dengan semut lainnya dia akan saling berhadapan dan menempelkan kepalanya. Sepertinya mereka sedang memberi salam dan berjabat tangan. Mereka selalu menjaga silaturahmi dengan sesamanya. Beda dengan manusia. Sebagian besar kita hanya akan bertemu, bertegur sapa dan bersalaman jika ada keperluan saja. Kalo tidak ada kepentingan, tidak akan sengaja datang untuk bertamu. Bahkan terkadang jika ada sedikit masalah antara teman atau saudara, kita sudah tidak mau bertegur sapa.

3. Semut selalu punya rencana jangka panjang

Semut seringkali menyimpan sebagian makanannya di “gudang”. Mereka tidak serakah dengan memakan semua makanan yang didapatkan dalam sehari. Semut terbiasa menyimpan makanan untuk persediaan jika musim hujan atau dingin tiba. Jika datang musim hujan atau dingin tentu mereka akan kesulitan mencari makan. Mereka lebih banyak berdiam diri di “rumah”. Tentu mereka tidak akan kelaparan karena sudah menyiapkan bahan makanan cadangan.

Kita bisa meniru semut. Bukan berarti secara harfiah kita menimbun banyak stok bahan makanan. Kita harus mempersiapkan keperluan kita untuk masa depan. Bisa dengan punya tabungan, deposito atau investasi. Sekarang ini banyak sekali bentuk penyimpanan dana termasuk dalam bentuk asset seperti tanah, rumah, toko dan sebagainya. Tapi menyiapkan bekal di masa depan bukan hanya berbentuk materi. Hal-hal yang sesungguhnya harus disiapkan adalah ilmu, mental dan fisik.



Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo menyampaikan presentasi pada acara Expo Comm Indonesia 2016 di JCC, Jakarta.

MELINDUNGI INFRASTRUKTUR KRITIS NASIONAL DARI SERANGAN CYBER: PERSEKUTIF KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh:

Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Sesjen Wantannas
&
Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T.
Anjak Renkon Ekonomi Kedepuitan Polstra Setjen Wantannas

“Teknologi *Internet of Things* (IoT) yang ditujukan untuk menghubungkan manusia dengan mesin dan mesin dengan mesin guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan”

TANTANGAN CYBER SECURITY PADA ERA KONEKTIVITAS

Era konektivitas antar orang dengan orang, orang dengan mesin, dan mesin dengan mesin telah memasuki kehidupan manusia semenjak semakin berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di masa lalu, konektivitas dibangun agar manusia dapat berkomunikasi satu dengan lainnya secara langsung walau dipisahkan jarak yang sangat jauh.

Bila di era awal konektivitas tersebut dilakukan dengan bantuan kabel-kabel komunikasi fisik (*wired*), maka dua dekade belakangan ini konektivitas telah dilakukan menggunakan sarana nir-kawat (*wireless*) dan konektivitas tidak lagi sebatas antar orang dengan orang, namun hingga konektivitas mesin dengan mesin.

Kemudahan dan kepraktisan dari komunikasi nir-kawat dan didorong oleh semangat pemaksimalan manfaat, kemampuan dan daya dukung dari TIK, dibangunlah teknologi Internet pada akhir tahun 1960-an. Konektivitas dibentuk melalui saluran komunikasi elektronika melalui kawat baik yang diinstalasi di bawah permukaan tanah maupun di bawah permukaan laut hingga nir-kawat dengan bantuan satelit-satelit komunikasi.

Peningkatan kebutuhan manusia yang menginginkan segala hal dapat diotomasi atau

diotomatiskan mendorong dibangunnya teknologi *Internet of Things* (IoT) yang ditujukan untuk menghubungkan manusia dengan mesin dan mesin dengan mesin guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

Teknologi IoT dapat membawa implikasi kepada organisasi ketika konektivitas tersebut direlaskan dengan infrastruktur kritis nasional seperti jaringan listrik (*electrical grid*) atau jaringan transportasi kereta api. Bayangkan ketika jaringan transportasi kereta api yang dikendalikan oleh komputer mendapat *cyberattack*. Implikasinya pergerakan semua kereta api tidak dapat dipantau oleh pusat pengendali sehingga probabilitas terjadinya kecelakaan kereta api semakin besar. Demikian halnya ketika jaringan listrik memperoleh *cyberattack*. Otomatis semua aktivitas yang memerlukan energi listrik akan berhenti. Dengan 2 (dua) contoh tersebut telah memperlihatkan bahwa era konektivitas membuka peluang ancaman *cyber* dan *cyberattack* yang lebih berbahaya dan mematikan serta berdampak masif bagi satu negara.

PENTINGNYA MELINDUNGI INFRASTRUKTUR KRITIS NASIONAL DARI ANCAMAN CYBER

Terdapat beberapa jenis infrastruktur kritis nasional yakni infrastruktur pada sektor-sektor

energi, transportasi, keuangan dan perbankan, telekomunikasi, pertahanan, penegakan hukum, keamanan dan intelijen, kesehatan, suplai air, tata kelola elektronik (*e-Governance*), industri kritis, organisasi-organisasi sensitif dan luar angkasa.

Berdasarkan laporan resmi dari salah satu industri informatika dunia, pada tahun ini ancaman *cyber* salah satunya mengarah kepada infrastruktur kritis. Sistem transportasi dan jaringan listrik yang digunakan sebagai contoh di atas adalah sebagian dari infrastruktur kritis nasional yang berhubungan erat dengan *cyberspace*.

Maka dapat dinyatakan bahwa ancaman terhadap fasilitas-fasilitas, sistem-sistem atau fungsi-fungsi yang dapat menjadikan pemerintahan tidak berfungsi dan berdampak pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari tahun ke tahun akan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas baik metode dan maupun jenis serangannya.

Sebagai contoh, pemerintahan telah mengamankan pelaksanaan *e-Governance* dengan membangun konektivitas di semua strata pemerintahan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan elektronik ini sejatinya telah lebih dulu dilakukan oleh kalangan swasta khususnya di bidang keuangan dan perbankan serta perdagangan. *e-Governance*, *e-banking* dan *e-commerce* memiliki infrastruktur kritis yang sama yakni data *center*, sebuah fasilitas yang memiliki sarana penyimpanan data para pelanggannya (*customer*).

Data pelanggan ini tidak hanya data para pelanggan dari masyarakat biasa, namun juga para pejabat negara yang *payroll*-nya dilakukan melalui bank-bank nasional tertentu. Bila data dalam data *center* tersebut dicuri dengan memanfaatkan *cyberspace*, maka dengan mudah aktor-aktor tak bertanggung jawab akan mampu membuat profil para pejabat tersebut dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Contoh sangat sederhana, *payroll* pegawai pemerintahan disimpan di 3 (tiga) bank besar milik pemerintah yakni Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri. Jebolnya *cybersecurity* ketiga bank tersebut akan membongkar data-data pribadi para pegawai pemerintahan yang disimpan dalam data *center*-nya.

Belum lagi dari sektor pertahanan dan keamanan. Seandainya dalam kondisi perang, terdapat kekhawatiran bahwa alat utama sistem senjata modern TNI yang berbasis sistem komputer tiba-tiba tidak dapat dioperasikan karena *cyberattack*. Radar-radar pertahanan udara Indonesia tiba-tiba tidak dapat beroperasi karena infrastruktur konektivitas pertahanan nir-kabel antar radar dimatikan secara jarak jauh. Kapal-kapal perang TNI AL tidak dapat beroperasi dikarenakan

infrastruktur konektivitas pertahanan nir-kabelnya bekerja tidak benar yang disebabkan oleh malware yang dioperasikan dari jarak jauh. Ketika dirgantara dan laut Indonesia terbuka tanpa penjagaan, maka kedaulatan negara di dirgantara dan laut dapat dengan mudah dikuasai dan dikendalikan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa perlindungan pada infrastruktur kritis nasional adalah sangat diperlukan dan urgen untuk segera dilakukan.

PERLINDUNGAN PADA INFRASTRUKTUR KRITIS NASIONAL

Memperhatikan perkembangan perangkat-perangkat TIK yang sangat pesat baik dari sisi *hardware* maupun *software*, *cyberattack* kepada instansi pemerintah, industri-industri yang melayani kebutuhan masyarakat dan organisasi-organisasi yang mengelola infrastruktur kritis nasional, di era konektivitas ini akan semakin meningkat frekuensinya dan semakin beragam tekniknya. Diprediksi akan banyak ditemukan metode-metode baru untuk *cyberattack* khususnya yang memanfaatkan kelengahan diri sendiri dan kelemahan dari sistem informasi yang diinstalasi di institusi sendiri. Teknologi untuk *cyberattack*, *cyber resilience*, *cyber crime* dan *cyber defense* akan saling berkejaran. Siapa yang memiliki teknologi terdepan, maka dialah pemenangnya.

Pada skala nasional, perlindungan pada infrastruktur kritis nasional yang tersebar di berbagai lokasi dan dikelola oleh beragam Kementerian/Lembaga dan juga oleh pihak swasta menjadi sebuah tantangan dan juga kesempatan yang sangat baik bagi kita. Setiap institusi tersebut, saya yakin telah memiliki standar masing-masing dalam perlindungan infrastruktur kritis yang dikelolanya dari *cyberattack*.

Pertanyaannya adalah siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji *cyberattack* terhadap standar-standar yang digunakan oleh setiap institusi dimaksud? Siapakah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa institusi dimaksud telah lulus uji standar? Hal ini dianalogikan dengan Badan Akreditasi Nasional yang memiliki kewenangan untuk menguji kelayakan pengelolaan perguruan tinggi didasarkan pada standar-standar yang berlaku. Maka, untuk meyakinkan bahwa infrastruktur kritis nasional telah terlindungi secara memadai dari *cyberattack* diperlukan uji standar atau akreditasi.

AKTOR-AKTOR PELAKU CYBERATTACK

Aktor-aktor pelaku *cyberattack* sebenarnya tidak sulit untuk dilacak. Bila sedikit mendalami konsep perang yakni *Center of Gravity* (CoG) baik dari Sun Tzu, Clausewitz dan John Warden III, maka

Dapat ditelusuri aktor di balik *cyberattack*, apakah *non-state actor*, *state-sponsored actor* atau *state actor*.

Dalam hampir semua kasus *cyberattack*, tidak ada satu negara pun yang akan mengakui bahwa inisiatif serangan berasal dari negara. Dalam kasus Estonia tahun 2007 dan Georgia 2008 serta Ukraine beberapa tahun lalu, *cyberattack* dilakukan oleh *state-sponsored actor* walaupun negara dimaksud tidak pernah mengakui memerintahkan atau membiayai *cyberattack* dimaksud. Sebagai contoh negara Inggris dalam *National Cybersecurity Strategy*-nya telah menyatakan bahwa ancaman utama dari *cyberspace* adalah *cyber crime* dari para aktor kriminal transnasional dan *state actor*, negara-

dikategorikan sebagai infrastruktur kritis nasional. Jangan terjadi tumpang tindih antara obyek vital nasional dengan infrastruktur kritis nasional. Apakah negara ini perlu mendapat *cyberattack* masif, sistemik dan terstruktur yang menyebabkan pemerintahan lumpuh agar Indonesia sadar betapa pentingnya *cybersecurity*?

CATATAN PENUTUP

Sebagai penutup, Ketahanan Nasional dan aspek berbangsa dan bernegara harus menjadi tujuan utama dari perlindungan pada infrastruktur kritis nasional. Untuk itu negara Indonesia memerlukan sebuah lembaga koordinator *cyber* nasional yang bertugas mengkoordinasikan kemampuan-kemampuan *cyber* nasional, menetapkan standar *cybersecurity* bagi infrastruktur kritis nasional, melakukan akreditasi *cybersecurity* dan membangun teknologi-teknologi terdepan *cybersecurity*. Setjen Wantannas telah berkontribusi aktif di bidang *cyber* nasional yang ditunjukkan dengan rekomendasi kepada Presiden RI pada tahun 2013 untuk membentuk *Desk Keamanan Siber Nasional (DKSN)*.

Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan membentuk *Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN)* pada tahun 2014 dan kemudian berevolusi menjadi

Desk Cyberspace Nasional (DCN) pada tahun 2016 yang beranggotakan multi-*stakeholder* baik dari kalangan pemerintah maupun swasta.

DCN inilah yang nantinya diharapkan menjadi embrio dari Badan *Cyber Nasional (BCN)*, sebagai lembaga koordinator kemampuan-kemampuan *cyber* nasional. Kita harus bergerak bersama dengan sangat cepat secara sinergi dan kolaborasi karena teknologi *cyber* juga bergerak dengan sangat cepat.

*Second is matter!*****

(Naskah ini merupakan pengembangan dari materi Sesjen Wantannas yang dipresentasikan pada Expo Comm Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 11 November 2016)



Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo pada acara Expo Comm Indonesia 2016 di JCC

negara yang menyponsori *cyberattack*.

Namun sangat tidak mudah untuk menetapkan siapa sebenarnya yang menjadi dalam *cyberattack* khususnya *state actor*. Era konektivitas memberi peluang bagi pelaku *cyberattack* untuk bersembunyi di mana saja di *cyberspace* yang tidak berujung.

Di negara Indonesia, hingga saat ini belum pernah terjadi *cyberattack* yang berimplikasi kepada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang pernah dialami oleh Estonia, Georgia dan Ukraina. Sejatinya di *cyberspace* yang sangat luas ini sedang terjadi perang tak kasat mata antara *cyber defender* dengan *cyberattacker*. Dampak fisik dari perang tersebut dapat berupa *deface* situs-situs pemerintah atau pencurian data transaksi keuangan secara elektronik atau percobaan intrusi ke dalam sistem informasi kita.

Untuk itu pemerintah harus segera menetapkan obyek-obyek vital nasional yang

TANTANGAN DI TAHUN 2017

Oleh : Muhammad Iqbal

Kita baru saja meninggalkan tahun 2016 dan mulai memasuki tahun baru 2017. Jadwal pergantian tahun merupakan peristiwa alami sepanjang kehidupan manusia yang sekaligus dapat dijadikan sebagai manifestasi peralihan kehidupan satu tahun sebelumnya ke kehidupan setahun berikutnya. Secara sederhana, peristiwa tersebut sebetulnya hanya sebagai tanda berakhirnya hitungan masa satu tahun ke hitungan masa satu berikutnya. Namun peristiwa tersebut sudah menjadi budaya dan sejarah serta *milestone* kehidupan umat manusia.

Secara filosofis, apa yang terjadi satu tahun sebelumnya adalah catatan dalam kaladeoskop pada tahun itu, dan memasuki periode berikutnya catatan tersebut diisi dengan resolusi berupa rencana-rencana pada setahun berikutnya. Begitulah yang lazim terjadi pada setiap pergantian tahun lama ke tahun baru. Peristiwa pergantian tahun bervariasi dari satu periode ke periode berikutnya, dimana tantangannya boleh dikatakan cenderung semakin berat refleksi dari kehidupan yang juga semakin menantang dan berat. Memasuki tahun 2017, secara ekonomi, kita dihadapkan pada tantangan yang cukup berat pula, baik dari aspek internal maupun aspek eksternal.

Dari aspek internal, paling tidak ada lima tantangan. Pertama, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 28 juta jiwa atau sekitar 10,86 persen dari total populasi Indonesia; Kedua, kerentanan terhadap goncangan ekonomi (*economic vulnerability*); Ketiga, kesenjangan (*disparity*) yang ditandai dengan indeks/kofisien rasio gini yang masih cukup tinggi, yaitu 0,39; Keempat, tingkat pengangguran terbuka yang juga cukup tinggi, yakni 5,5 persen; Kelima, kondisi fiskal yang ditandai dengan belum optimalnya penerimaan dan belanja negara.

Dari aspek eksternal, setidaknya-tidaknya terdapat empat tantangan. Pertama, adanya perlambatan ekonomi global; Kedua, masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Britain Exit/Brexit*); Ketiga, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45; Keempat, belum pulihnya harga komoditas internasional.

Di luar dari sembilan tantangan ekonomi di atas (5 internal dan 4 eksternal), kita dikejutkan dengan munculnya fenomena penyesuaian tarif atau kenaikan harga. Di awal tahun 2017, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, tarif listrik, dan pengurusan

dokumen kendaraan. Sementara itu, terjadi pula anomali kenaikan harga komoditas cabai yang cukup fantastis. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan penyesuaian tarif BBM lebih disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Kenaikan tarif listrik sebetulnya karena pencabutan subsidi kepada pelanggan yang tidak layak mendapatkan subsidi tarif listrik. Sementara itu, untuk dokumen kendaraan adalah dalam rangka peningkatan fitur keamanan dan kualitas material untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), diikuti dengan peningkatan pelayanan *online*, modernisasi peralatan, serta insentif bagi petugas dalam rangka meminimalisasi praktik pungutan liar dan korupsi. Khusus untuk kenaikan harga cabai, sebetulnya faktor penyebab utamanya adalah karena terganggunya rantai pasok dan spekulasi pelaku perdagangan.

Kebijakan penyesuaian tarif dan fenomena kenaikan harga telah menimbulkan ragam reaksi dan kontroversi. Kita bersyukur, hal tersebut tidak sampai menimbulkan kegaduhan, apalagi protes demonstrasi yang berlebihan. Ini menandakan bahwa masyarakat relatif sudah bijaksana dalam menyikapi fenomena yang terjadi, khususnya terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif dan fenomena kenaikan harga. Apakah kebijakan pemerintah tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa. Kurang atau terlambatnya sosialisasi secara menyeluruh merupakan hal yang perlu kita maklumi bersama mengingat luas dan besarnya geografi dan demografi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan mulainya tahun baru 2017, mari kita sama-sama bekerja keras diiringi dengan komitmen tinggi agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kata-kata bijak mengatakan bahwa “.....apabila tahun ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya, berarti sukses”, dan “.....apabila tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, berarti gagal”, serta “.....apabila tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, berarti tidak ada perubahan yang konotasinya adalah cenderung gagal”.

Selain bekerja keras dan komitmen tinggi, satu hal yang perlu dipraktikkan adalah agar kita “jangan mengeluh” di luar konteks proporsionalitas dan profesionalitas. Bung Karno pernah menyatakan bahwa “.....jangan mengeluh, karena keluh adalah tanda kelemahan jiwa”. Lebih dari itu “.....Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa pada diri mereka (QS 13:11)”.****



Oleh: Sutarno

Sekitar tahun 1950-an hingga awal 1980-an di dunia siaran, ada tokoh terkenal yang biasa di panggil dengan “Pak Besut”. Bukan nama sebenarnya sih. Namun sangat lekat dengan pendengar radio waktu itu. Maklum Televisi saat itu hanya ada satu-satunya yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang mulai mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962. Itupun masih hitam putih. Pak Besut dikenal sebagai wartawan tiga zaman, Juru Penerang lewat Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta melalui acara “Obrolan Pak Besut”, setiap Kamis dan Sabtu pukul 21.00. Selama 36 tahun secara terus menerus. Luar biasa. Isi obrolannya sangat menarik, kalau nggak menarik ya nggak bertahan selama itu.

Ada unsur hiburan, pendidikan, ekonomi, politik bahkan internasional disesuaikan dengan aktualitas saat itu. Gayanya “*sembrono pari keno*”. Mohon maaf, kebetulan penulis tidak tahu bahasa Indonesia-nya “*sembrono pari keno*”. Mungkin sersan-serius tapi santai. Memaparkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu, namun tidak mengambil kesimpulan.

Pendengar dipersilahkan menyimpulkan sendiri. Pada suatu saat, Pak Besut dalam siarannya menyampaikan bahwa ada seorang Putra Jawa dari kalangan rakyat biasa, maksudnya bukan dari kalangan priyayi. Saat ini (waktu siaran itu), Si Putra Jawa tadi, menjadi orang yang sangat penting di Negara ini, menduduki posisi sangat berpengaruh di Republik ini. Ibarat pepatah, kata-katanya menjadi dekrit, meludah jadi api, menunjuk api jadi padam. Namun dalam peribahasa, “seperti kacang lupa kulitnya”.

Presiden Suharto waktu itu merasa tersinggung dengan obrolan yang “*sembrono pari keno*” dari Pak Besut, yang bersangkutan dipanggil ke istana untuk klarifikasi, dan selanjutnya...terbitlah

BANJIR HOAX HUJAN KEBENCIAN

buku Biografi Presiden Suharto. Waktu itu belum populer HP Android, *wong ...* TV swasta saja belum ada.. dan waktu itu istilah “Hoax” belum populer, jadi yang dianggap Hoax tidak cepat menyebar.

Belakangan, mendadak muncul tokoh lewat media massa konvensional dan media sosial, Bambang Tri Mulyono. Penulis buku berjudul “Jokowi *Undercover*.” Melacak Jejak Sang Pemalsu Jati diri, Prolog Revolusi Kembali ke UUD 45 Naskah Asli. Buku tersebut dijual secara elektronik *online*, sehingga dalam waktu singkat beredar tanpa batas tempat dan waktu. Namun juga dengan segera, Bambang Tri Mulyono berurusan dengan Polisi, karena dianggap apa yang ditulis adalah Hoax. Menebar kebencian..dan lain sebagainya. Luar biasanya lagi, banyak deklarasi dari berbagai organisasi yang “Anti Berita Hoax” di berbagai kota. Sehingga..Hoax seperti musuh semua orang, seluruh masyarakat, semua anak negeri bahkan dianggap musuh negara.

APA SIH PENGERTIAN HOAX ITU?

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata “Hoax”. Dalam Kamus Oxford (*Oxford Dictionary*): Hoax sebagai kata benda (noun) *a humorous or malicious deception* (suatu muslihat humor atau jahat) dalam kata kerja (verb) *deceive with a hoax* (melakukan hoax). Jadi mungkin, hoax itu dimaksudkan sebagai humor, menjaili atau menjahati fihak lain, dengan berita palsu atau bohong atau berita yang sudah diedit sedemikian rupa, melalui forum internet. Seiring kemajuan teknologi internet, media Hoax bisa melalui berbagai macam. Misalnya bisa dilakukan melalui email, *messenger*, *friendster* bulletin, sms dan lain sebagainya. Isi atau konten atau topik dari Hoax ini juga menyangkut apa saja. Mulai dari politik, ekonomi, pilkada, virus komputer, kesehatan, segala macam...hingga obat kuat. Lalu apa bedanya

Antara spam dan hoax? Mungkin mudahnya saja, spam adalah email berisi iklan suatu produk atau website tertentu yang tidak diinginkan penerima. Sedangkan Hoax, ya seperti sudah dijelaskan diatas, berita bohong atau berita palsu. Bisa berupa tulisan, rekaman suara, gambar, foto, video dan lain sebagainya. Hanya sayangnya, tingkat literasi atau edukasi bangsa Indonesia sangat variatif, sehingga tidak mudah mengetahui suatu berita atau pesan atau masage itu Hoax atau berita itu fakta asli.

Ada sedikit cara untuk mengetahui apakah pesan yang sampai kepada pembaca itu adalah Hoax, bisa dilihat dari ciri ciri sebagai berikut:

1. **Sumber asli tidak jelas.** Biasanya pembuat berita atau pesan hoax, identitasnya tidak jelas, sengaja disembunyikan, atau disamarkan, memanfaatkan organisasi tertentu atau mencatut nama-nama beken.
2. **Distribusi di media *mailing list*, atau email berantai.** Hal ini karena sifat Media sosial yang cepat, mudah disebarkan, *shareability*. Pembuat

BAGAIMANA MENSIKAPI BERITA HOAX?

Beberapa waktu silam, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, pernah menyatakan bahwa masyarakat menjadi sulit untuk membedakan suatu berita atau pesan. Apakah itu palsu (hoax) atau berita asli alias fakta. Media massa konvensional seperti televisi, koran, majalah, buletin dan media sosial seperti Facebook, Email, Whatsapp, Twitter, tidak bebas nilai. Ada muatan atau terkandung kepentingan pihak terkait atau biasa disebut pemangku kepentingan. Sudah banyak bukti bahwa butuh perjuangan untuk menghadapi hoax ini. Berita atau pesan yang diekpose melalui media digital, membuat masyarakat lebih sulit untuk mengetahui kebenaran konten atau isi berita. Apalagi berita *online*. Lebih sulit lagi membedakan aslinya dengan hoax. sayangnya lagi, seandainya bisa membuktikan pesan itu hoax, dan akan dihapus, ternyata tidak mudah. Menghapus hoax di media sosial saat ini kurang didukung oleh teknologi.

speechless
disekitarmu



pesan atau berita memanfaatkan fenomena gelembung atau bubbles dalam penggunaan media massa. Group WhatsApp (WA) misalnya menggambarkan kelas sosial tertentu, ciri tertentu, ketertarikan tertentu. Maka hoax mempunyai pengaruh besar bila diambil oleh group yang beranggota banyak.

3. **Berisi pesan “kecewa”, “cemas”, “tidak puas”.** Sehingga pembaca diharapkan panik. Kadang kadang ya... hanya sekedar “humor”, “dagelan”. Bagi pihak yang merasa ada kesamaan hati, ide, sikap seolah mendapat simpati dan empati. Sayangnya yang namanya simpati dan empati ini belakangan makin menipis. Itupun kalau masih ada.
4. **Ajakan *forward* pesan atau berita.** Pembuat berita hoax seolah-olah di pihak pembaca, sayang dengan pembaca, peduli dengan pembaca. Sehingga diajak untuk melindungi keluarga, teman, sahabat dan orang terdekat. Maka segeralah...*forward*. Oleh karena itu, ada kebijakannya bila pembaca sedikit menahan diri untuk “*forward*” suatu pesan atau berita.

Meskipun tulisan dapat dihapus, tetapi posisi server berada di luar negeri. Belum terhapus. Masih bisa diakses. Jadi berita di internet atau *online* bersifat permanen. Lalu bagaimana mensikapi berita hoax?

MENSIKAPI BERITA HOAX

1. **Jangan reaktif.** Jika kebetulan, pembaca terlibat pemeritaan hoax. Lebih bijak tidak reaktif. Jangan cepat marah marah, kebakaran jenggot. Karena bila ini yang terjadi, ibarat menendang pintu yang sudah terbuka. Teliti dengan tenang, apa yang diinginkan oleh pembuat hoax.
2. **Cari data pembanding.** Pembaca perlu disediakan data pembanding. Untuk menghindari bahwa data atau isi atau konten berita hoax itu dianggap benar, maka sajikan data asli, fakta, atau berita riilnya.
3. **Buat bantahan dan dukung data sesungguhnya.** Menghadapi berita palsu atau pesan Hoax, perlu pihak yang bersangkutan membuat bantahan. Hal ini menunjukkan sikap bahwa yang bersangkutan tidak senang dengan



MENKO POLHUKAM: DEMI KEMASLAHATAN BERSAMA, PEMERINTAH AKAN TINDAK TEGAS PENGUNGGAH KEBOHONGAN DI MEDIA SOSIAL

Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto : Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang menggunakan media sosial (medsos) untuk mengunggah informasi yang menjurus kepada provokasi, agitasi, propaganda, menyesatkan, pengelabuan, kebohongan, dan melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak lain. (polkam.go.id)

berita tersebut, dan pembuat Hoax untuk minta maaf, memperbaiki kekhilafan. Bantahan tersebut akan lebih baik dan elegan kalau didukung dengan data asli. Tunjukkan bahwa yang sesungguhnya adalah seperti ini.

4. Dewasa dan cerdas menerima berita atau pesan. Dari sisi penerima berita, diperlukan kedewasaan. Dalam arti gunakan akal sehat. Apakah logis atau tidak. Masuk akal atau tidak. Dalam kehidupan ini pasti ada fihak yang kecewa, kalah, tidak puas, sakit hati, cemas dan lain sebagainya. Mungkin berita hoax adalah ekspresi dari hal-hal tersebut. Dari sisi pembuat pesan atau berita, perlu disadari bahwa media sosial adalah ruang privat sekaligus ruang publik. Banyak teman, sahabat, kluarga, fihak lain yang ada di sekitar dengan berbagai karakter, kepribadian, pendidikan, kondisi

sosial ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dalam bersosmed. Dalam arti, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan lewat media sosial.

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah perlu mempunyai strategi dan kebijakan melindungi warga negara dari dampak hoax. Sehingga dikeluarkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dan mulai berlaku pada 28 November 2016. Sebagai *leading sector* adalah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Harapannya untuk menghindarkan masyarakat dari penahanan serta merta, mengu-

Rangi ancaman hukuman bagi pelanggaran UU ITE menjadi tidak lebih dari empat tahun, misalnya Pasal 27 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, semula diancam hukuman paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Pasal 29 terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari semula 12 tahun menjadi empat tahun. Dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, aparat kepolisian tidak bisa langsung melakukan penahanan.

Hal yang baru adalah mengatur hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), yaitu hak untuk menghapus memori data di internet. Mekanismenya masih menjadi kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Menurut berbagai fihak, implementasinya perlu mendapat dukungan semua pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga, masyarakat, perguruan tinggi maupun pengusaha. Masalah yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan, karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan konvergensi teknologi informasi, media, dan informatika yang sulit diawasi. Kegiatan ini melalui apa yang disebut dengan ruang siber (*cyber space*), bersifat virtual namun dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Sebagai pribadi, pesan nyata dari sini adalah suatu kesadaran bahwa teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, pengungkapan kebencian, propaganda, penipuan. Juga kesadaran lahirnya suatu rezim hukum baru, hukum siber atau *cyber law*, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*).

Sebagai penutup tulisan ini, mohon lebih dewasa dalam ber media sosial. ****



Gerakan masyarakat anti-Hoax pada Deklarasi Masyarakat Indonesia anti hoax (Bentuk perlawanan Masyarakat terhadap ketidakadilan dan ketidakjujuran di Media Sosial (antara)



Gerakan masyarakat anti-Hoax pada Deklarasi Masyarakat Indonesia anti hoax (Bentuk perlawanan Masyarakat terhadap ketidakadilan dan ketidakjujuran di Media Sosial di Bandung - Jawa barat (sindonews)



Teliti dan lebih cerdaslah dalam membaca dan melihat sebuah berita, karena cara paling mudah menangkal berita bohong adalah dengan tidak mudah dibohongi.

.....Indra Suryaman.....

MENGENAL HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN

HOAX dimaksudkan sebagai humor, menjaili atau menjahati pihak lain, dengan berita palsu atau bohong atau berita yang sudah diedit sedemikian rupa, melalui forum internet.

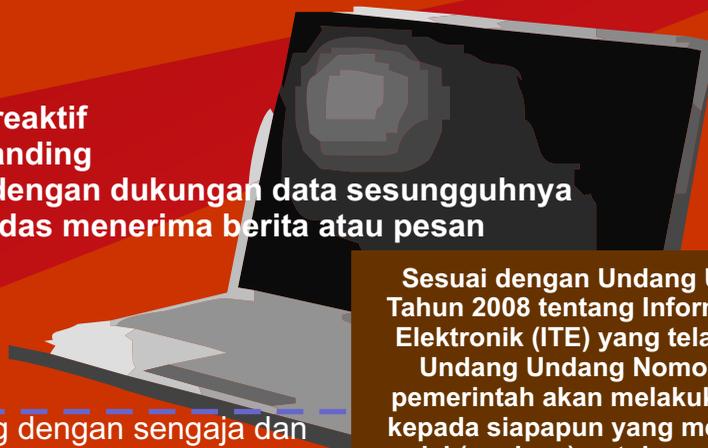
Oxford Dictionary

Ciri-ciri HOAX

- Sumber Tidak Jelas
- Distribusi di Media *Mailing List*
- Berisi Pesan “Kecewa”, “Cemas”, “Tidak Puas”.
- Ajakan *Forward* pesan atau berita

SIKAPI BERITA HOAX

1. Jangan mudah reaktif
2. Cari data pembandingan
3. Buat bantahan dengan dukungan data sesungguhnya
4. Dewasa dan cerdas menerima berita atau pesan



‘Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.’ *(Pasal 28 ayat 1 UU ITE No.11 2008)*

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang menggunakan media sosial (medsos) untuk mengunggah informasi yang menjerus kepada provokasi, agitasi, propaganda, menyesatkan, pengelabuan, kebohongan, dan melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak lain.

HOAX

Menteri Komunikasi dan Informatika : sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*)

Rudiantara-29/12/2016

Demi melawan penyebaran konten hoax, adalah dengan mencoba memutus sumber pendapatan situs berita bohong dengan menutup layanan iklan Google AdSense mereka

Oleh : Desi Fajar Nita

Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng

SOSOK PENELITI DI SETJEN WANTANNAS



Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng adalah sosok peneliti dari Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang ditugaskan pada instansi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Di BATAN sendiri Hendri pernah duduk dalam Jabatan Fungsional pada jenjang Peneliti Muda dan Peneliti Madya BATAN. Jabatan peneliti diampu Hendri selama lebih dari sepuluh tahun. Selain melaksanakan tugas sebagai Peneliti, Hendri merangkap jabatan struktural Eselon III sebagai Kepala Bidang Teknologi Daur Bahan Nuklir BATAN pada 2002. Selanjutnya pada 2003 ia menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Reaktor BATAN.

Hendri adalah sosok yang konsisten pada bidang keilmuan Teknik Nuklir, dimana lulus S1 dari Teknik Nuklir Universitas Gadjahmada, S2 dari *Nuclear Engineering of Osaka University* dan menyelesaikan program *Doktoral Nuclear Engineering* dari perguruan tinggi paling terkemuka di Jepang yaitu *Tokyo Institute of Technology*. Pada 1997 Hendri meraih penghargaan AP600 Program Award yang dikeluarkan oleh *New Plant Project - Nuclear Energy Divison, Westinghouse*

Electric Corporation, Pennsylvania, USA. Pada 2006 Hendri mendapat penugasan pada instansi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebagai Analis Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Politik Nasional Kedeputan Politik dan Strategi berdasarkan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor



23/SK/09/2006 tanggal 19 September 2006.

Pada 15 Februari 2008 ia dilantik sebagai Kepala Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas sesuai dengan Keputusan Sesjen Wantannas nomor : 51/SK/I/2008 tanggal 18 Januari 2008. Tiga tahun kemudian ia kembali dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada 28 Maret 2011. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : Kep-30/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

Sebagai seorang yang banyak berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, Hendri mengungkapkan pendapatnya mengenai perkembangan era digital dewasa ini kaitannya dengan Wantannas. "Program pemerintah mengenai era digital sudah dimulai sejak sekitar tahun 1997. Pada saat itu dibuat sebuah gagasan yang disebut Visi NUSANTARA 21 yang menyatukan NUSANTARA melalui penyediaan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika nasional di dalam proses transformasi bangsa Indonesia dari masyarakat tradisional (*traditional society*) menjadi sebuah masyarakat yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) dengan dukungan teknologi berbasis satelit," papar Hendri.

Lebih lanjut Hendri menjelaskan bahwa pemerintah sudah memulai program *e-government* sejak tahun 2001 untuk menyesuaikan pada era digital tersebut. Menurut definisi *United Nation Development Programme (UNDP)* secara lebih sederhana yaitu "*E-government is the the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*"



E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada

masyarakat.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dihubungkan dengan optimalisasi teknologi, Hendri berpendapat, selain regulasi, sebuah keniscayaan bahwa SDM pun harus dibina agar bisa merespon era digital tersebut. "Sudah keniscayaan siapa yang tertinggal dari kecepatan laju era kedigitalan ini, maka kita pun akan tertinggal," lanjut Hendri. Secara intitusi, K/L pun harus melakukan pembinaan terhadap SDM agar seiring dengan perkembangan era digitalisasi, karena dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam ruang "cyber space" dan waktu "real time".

Menanggapi penerapan teknologi di lingkungan Setjen Wantannas agar rencana kerja dan target organisasi bisa tercapai, lebih lanjut Hendri mengatakan "Teknologi itu adalah *tool*, itu sudah tersedia dan cukup canggih. Saya kira kita harus membangun regulasi yang mumpuni, SDM nya juga harus dibina agar mampu merespon kekuatan digital itu. Saya kira itu," jelas Hendri.

Dalam kesempatan wawancara ini, Hendri juga menjelaskan bahwasanya hoax perlu sekali untuk dikaji itu. Namun, yang lebih penting dalam menghadapi era digital ini adalah kita perlu meliterasi dan mengedukasi masyarakat untuk menghadapi itu, karena perlu pembelajaran berpikir kritis dalam dalam menilai sebuah berita. Kalau zaman dahulu, berperang dengan musuh yang nyata juga dengan senjata yang nyata. Tapi kalau sekarang, kita berperang dengan hoax yang berwujud tulisan mengagitasi pikiran orang lain yang dampaknya abstrak dan tidak kelihatan, Jadi literasi dan edukasi masyarakat sangat penting.

Pada 28-29 Maret 2017 akan dilaksanakan Konferensi Internasional *Asia Refining Technology Conference* (ARTC) 2017. ARTC adalah konferensi tahunan tentang perkembangan teknologi refening, dan Setjen Wantannas ditunjuk sebagai *Co-Host* untuk pelaksanaan di Indonesia, di mana Hendri berperan sebagai Ketua *Co-Host* Setjen Wantannas.

DATA DIRI

- NAMA : Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng.
- PANGKAT : Pembina Utama Madya/IV.d
- JABATAN : Staf Ahli Bidang Iptek
- KESATUAN : Dewan Ketahanan Nasional
- NIP : 19641216 198703 1 002
- TTL : Malang, 16 Desember 1964
- SUKU BANGSA : Jawa
- AGAMA : Islam
- PENDIDIKAN : Strata 3 Tahun 2000
- NAMA ISTERI : Lilis Kurniasih
- JUMLAH ANAK : 3 (tiga) orang

KECAKAPAN BAHASA :

- INGGRIS : Aktif

PENUGASAN LUAR NEGERI :

- Pittsburgh, Amerika Serikat 1995-1997
- Jepang 2000
- Hawaii, Amerika Serikat 2010
- London, United Kingdom 2011

RIWAYAT JABATAN :

- PENELITI MUDA BATAN
- PENELITI MADYA BATAN
- KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAUR BAHAN NUKLIR BATAN
- KEPALA BIDANG TEKNOLOGI REAKTOR BATAN
- ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA POLITIK NASIONAL KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI SETJEN WANTANNAS
- KEPALA BIRO HUMAS DAN PERSIDANGAN SETJEN WANTANNAS
- STAF AHLI BIDANG IPTEK – SETJEN WANTANNAS

PENGHARGAAN :

- AP600 PROGRAM AWARD Tahun 1997
- KARYA SATYA X Tahun 1999
- KARYA SATYA XX Tahun 2009

Hendri mengatakan ada keuntungan tersendiri bagi Setjen Wantannas yaitu kegiatan ARTC ini masih relevan dengan tugas dan fungsi Setjen Wantannas. Kegiatan ini juga merupakan sarana untuk memperkenalkan Setjen Wantannas pada dunia internasional dan sarana untuk membangun jaringan yang lebih luas dengan *stakeholder* dari dalam dan luar negeri.

Hendri yang juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Unit Setjen Wantannas menjelaskan bahwa *capacity building* amat diperlukan bagi seluruh anggota KORPRI khususnya di lingkungan Setjen Wantannas dalam menghadapi era digitalisasi.

Pada akhir wawancara, Hendri berpesan kepada seluruh anggota KORPRI Setjen Wantannas :

BELAJAR SECARA KONSISTEN PADA KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI YANG DIMINATI. ****

(Sesuai hasil wawancara oleh : Desi)



Foto : Internet

Oleh: Desi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggantikan PP No. 50 Tahun 2010. PP No. 60 tahun 2016 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 dan diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mulai berlaku pada 6 Januari 2017.

Menurut PP ini, jenis PNPB yang berlaku pada Polri di antaranya meliputi penerimaan dari:

- ◆ Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru;
- ◆ Penerbitan perpanjangan SIM;
- ◆ Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi;
- ◆ Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor;
- ◆ Pengesahan STNK Bermotor;
- ◆ Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- ◆ Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- ◆ Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB);

- ◆ Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
- ◆ Penerbitan STNK Bermotor Lintas Batas Negara;
- ◆ Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- ◆ Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan



Awal usulan penyesuaian datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB. Dengan disertai rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR, Polri mengusulkan hal tersebut ke Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan RI untuk membahas tarif PNBP tersebut dan kemudian diajukan PP tarifnya.

Penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB ini dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat (berdasarkan kondisi tahun 2010). Tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016 agar pelayanan dapat ditingkatkan secara *online* dan cepat disertai jaminan kepastian

tarif yang lebih transparan dan akuntabel. (Catatan : dalam PP Nomor 60 Tahun 2016, yang diatur bukan hanya pengurusan surat kendaraan bermotor tapi seluruh jenis dan tarif PNBP di Polri)

Seperti diketahui, PNBP adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh negara dari masyarakat selain pajak. PNBP ini bersifat *earmarking*, artinya ketika sudah disetor masuk ke negara akan dikembalikan ke masyarakat untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan sumber PNBP tersebut. Misalnya tarif PNBP untuk pengurusan STNK hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan STNK. Konsekuensi kenaikan PNBP untuk mendorong reformasi pelayanan publik yang lebih efisien transparan dan akuntabel.****

KENAIKAN TARIF STNK DAN BPKB 2017

RODA DUA



JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN
STNK BARU	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STNK PERPANJANG/5 TAHUN	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STNK PENGESAHAN/5TAHUN	25 RIBU	-	-
PELAT NOMOR/ 5 TAHUN	30 RIBU	60 RIBU	100 %
STCK	25 RIBU	25 RIBU	0 %
BPKB BARU	80 RIBU	225 RIBU	181 %
BPKB GANTI PEMILIK	80 RIBU	225 RIBU	181 %
MUTASI	75 RIBU	150 RIBU	100 %

JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN
STNK BARU	50 RIBU	200 RIBU	300 %
STNK PERPANJANG/5 TAHUN	50 RIBU	200 RIBU	300 %
STNK PENGESAHAN/5TAHUN	-	50 RIBU	-
PELAT NOMOR/ 5 TAHUN	50 RIBU	100 RIBU	100 %
STCK	25 RIBU	50 RIBU	100 %
BPKB BARU	100 RIBU	375 RIBU	275 %
BPKB GANTI PEMILIK	100 RIBU	375 RIBU	275 %
MUTASI	75 RIBU	250 RIBU	233 %

RODA EMPAT



*TARIF DALAM RUPIAH



RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh : Enang Suhendar

Senin, 5 Desember 2016 bertempat di Ruang Flores Hotel Borobudur Jakarta diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional (Rakor Wantannas) yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh para Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi/Sekretaris Menteri) atau pejabat yang mewakili dari 14 Anggota Tetap Wantannas. Acara tersebut dihadiri pula oleh para Deputi, para Staf Ahli, para Pembantu Deputi, para Kepala Biro dan pejabat lainnya di lingkungan Setjen Wantannas. Rakor tersebut membahas dua judul strategis yaitu Revitalisasi Wantannas dan Setjen Wantannas Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Menjaga Pilkada 2017 yang Demokratis, Damai dan Bermartabat Dalam Rangka Ketahanan Nasional.

Mengawali sambutannya, Sesjen Wantannas mengulang sepintas mengenai Wantannas untuk menyegarkan kembali pemahaman hadirin yang hadir mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. "Tugas pokoknya adalah membina ketahanan nasional untuk menopang pembangunan nasional dan

menjaga kepentingan nasional meliputi aspek Ipoleksosbudhankam" papar Sesjen. Sesjen melanjutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Wantannas dibantu oleh Setjen Wantannas yang sehari-hari bertugas menyiapkan rancangan kebijakan pembinaan ketahanan nasional melalui berbagai pengkajian, bekerjasama dengan K/L, perguruan tinggi tanah air, pemerintah daerah, *civil society*, para akademisi, para pakar, asosiasi, dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam advokasi demokrasi maupun HAM yang bertujuan agar dapat mencapai rekomendasi pembinaan ketahanan nasional yang komprehensif dan implementatif.

Sesjen menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan tema mengenai revitalisasi Wantannas ini dibahas dalam Rakor, yaitu tantangan Iplokesosbudhankam semakin bervariasi dan multidimensional, adanya peluang yang lebih luas bagi bangsa Indonesia untuk maju dalam ekonomi dan kesejahteraan, dan eksistensi Wantannas sebagai fasilitas staf Presiden dalam merumuskan rancangan kebijakan ketahanan nasional dituntut lebih responsif dan antisipatif dalam memecahkan solusi terhadap berbagai permasalahan krusial strategis.

Diskusi Panel yang pertama mengenai Revitalisasi Wantannas dipandu oleh moderator Pembantu Deputi (Bandep) Urusan Lingkungan Strategi Regional, Brigjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM. Selanjutnya paparan disampaikan oleh Bandep Urusan Strategi Nasional, Marsma TNI Bayu Roostono, SH, MM. Ia menyampaikan mengenai dinamika potensi ancaman dan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Adapun urgensi revitalisasi yaitu adanya pergeseran paradigma keamanan menjadi *state center security* dan *people center security* serta *human security* yang mencakup keamanan energi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, dll. Paradigma ancaman pun bergeser menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diprediksi (*complexity and unpredictability*).

(Depolstra) Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH. Mengawali paparannya, Depolstra menyampaikan mengenai beberapa persoalan yang dihadapi menjelang Pemilukada yaitu kerumitan regulasi, integritas penyelenggara, perilaku peserta Pilkada, perilaku masyarakat, dan permasalahan keamanan. Setelah mereview akar masalah dan implikasinya, Depolstra menyampaikan arah kebijakan yang perlu ditempuh yaitu mewujudkan Pilkada 2017 yang demokratis, damai dan bermartabat melalui penyelesaian yudisial review yang tepat waktu, penguatan integritas penyelenggara Pemilu, penegakan hukum yang adil, pencegahan provokasi dan penanganan keamanan yang terpadu dalam rangka ketahanan nasional. "Strategi untuk penguatan



Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo foto bersama narasumber dan peserta Rakor



"Strategi kebijakan pembangunan keamanan nasional adalah terbangunan sistem keamanan nasional yang terintegratif," papar Bayu. Penjelasan tersebut kemudian ditanggapi oleh para narasumber yang hadir yakni Prof. Dr. Cecep Darmawan, Dr. Edy Prasetyono, dan Salim Said, Ph.D.

Diskusi panel yang kedua dengan judul bahasan Pemilukada 2017 dipandu oleh moderator Dr. Didik Supriyatno dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Adapun pemaparan disampaikan oleh Deputi Bidang Politik dan Strategi,

integritas penyelenggara adalah dengan upaya melakukan konsolidasi antar penyelenggara, menerapkan sistem *reward and punishment*, menerapkan transparansi dan akuntabilitas, penguatan etika dan peningkatan kinerja" jelas Depolstra. Sementara dalam melaksanakan pengamanan terpadu dilakukan dengan upaya meningkatkan sinergitas antar aktor keamanan, pelengkapan sarana dan prasarana aparat penegak hukum, peningkatan deteksi dini, dan penindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran. ****

"Wantannas sebagai fasilitas staf Presiden dalam merumuskan rancangan kebijakan ketahanan nasional dituntut lebih responsif dan antisipatif dalam memecahkan solusi terhadap berbagai permasalahan krusial strategis"

Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Rakor Wantannas 2016



ANALIS KEBIJAKAN SETJEN WANTANNAS RAIH BEST PAPER AWARD PADA FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTING, ELECTRONICS AND COMMUNICATION 2016 DI ROMA, ITALIA

Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., Analis Kebijakan (Anjak) Bidang Rencana Kontinjensi Ekonomi, Kedepuitan bidang Politik dan Strategi Setjen Wantannas berhasil meraih *Best Paper Award* sebagai makalah ilmiah terbaik pada forum *Fourth International Conference on Advances in Computing, Electronics and Communication 2016 (ACEC2016)* yang diselenggarakan pada 15-16 Desember 2016 di Roma, Italia. Pada konferensi internasional bersama (*joint conference*) yang dihadiri oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi dari 44 negara di dunia.

Kolonel Lek Dr. Arwin menyampaikan makalah ilmiahnya berjudul "*Information Fusion as Knowledge Extraction in an Information Processing System*", yang merupakan salah satu hasil penelitiannya bersama Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad, DEA dari *Cognitive Artificial Intelligence Research Group (CAIRG)*, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung. *Best Paper Award ACEC* adalah penghargaan tertinggi tingkat dunia versi *Institute of Research Engineers and Doctors (IRED)* dari Amerika Serikat, yang diberikan kepada makalah ilmiah terbaik dalam keilmuan tingkat lanjut di bidang komputasi, elektronika dan komunikasi.

Dalam makalah ilmiah tersebut



disampaikan konsep mengenai fusi informasi (*information fusion*) sebagai satu teknologi yang dapat mengemulasikan cara manusia berfikir yakni mengolah data yang diperoleh dari kelima panca inderanya guna memperoleh informasi yang komprehensif dan dari informasi tersebut diekstraksi pengetahuan yang nantinya menjadi pengetahuan baru yang disimpan di dalam otak manusia. Dengan kata lain terjadi "penumbuhan" pengetahuan dalam otak manusia, dari tidak ada menjadi ada.

Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Pengolahan informasi sangat mudah dilakukan oleh manusia dan mekanisme ini berjalan secara otomatis dalam kehidupan sehari-harinya sehingga pengetahuan manusia semakin bertambah seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima seiring dengan berjalannya waktu. Mekanisme kognitif ini yang diemulasikan melalui fusi informasi agar dapat diaplikasikan pada wahana-wahana gerak mandiri (*autonomous mobile*) seperti *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, *Unmanned Ground Vehicle (UGV)* dan *Unmanned Underwater Vehicle (UUV)*.

Melalui penelitian tersebut telah berhasil dibangun sebuah sistem yang disebut dengan *Knowledge-Growing System (KGS)* pada tahun 2010 melalui dengan menggunakan mekanisme "penumbuhan" pengetahuan yakni metode

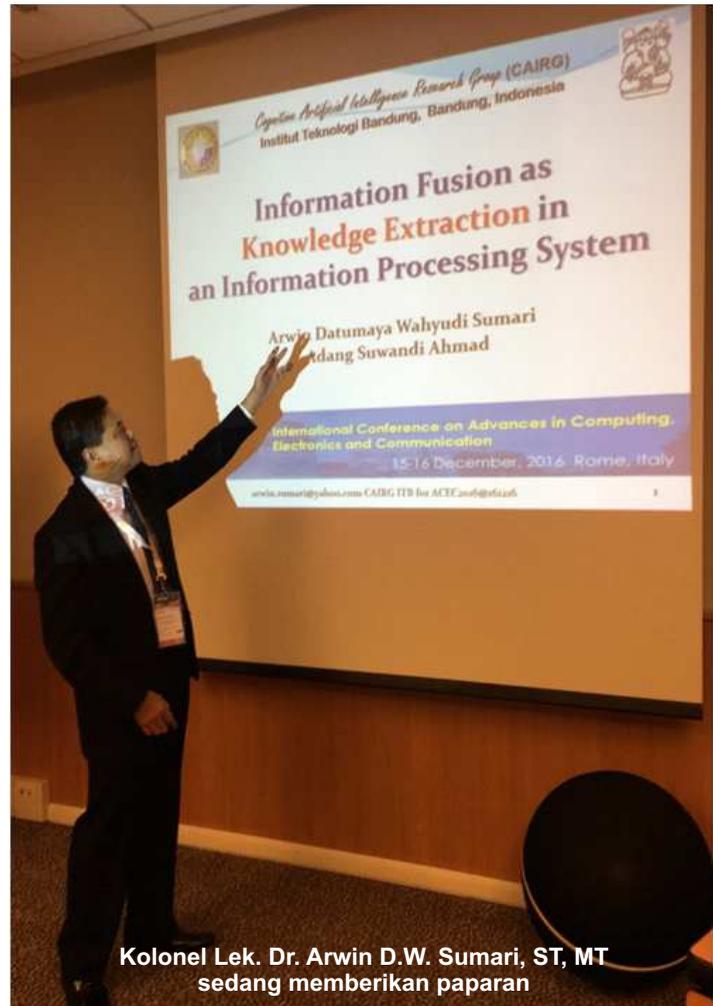
Penginferensian-informasi A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring), yang ditemukan dan dikembangkan oleh Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T. pada tahun 2010 dalam disertasi Doktor-nya, namun telah dikembangkan sejak tahun 2006 saat sedang menyelesaikan program Magister di STEI ITB. Sebagai *Proof of Concept* (PoC), sistem dan metoda A3S ini telah diaplikasikan pada:

1. *Integrated Information Fusion System for Indonesian Coast Guard Decision Support* (IIFS-ICGDS) versi 1.0 untuk keperluan pengolahan dan analisa data intelijen Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
2. *Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (C4ISR) operasi militer untuk keperluan pengolahan data dan analisa keadaan Cuaca, Medan, Musuh (CuMeMu) agar diperoleh kondisi pelaksanaan operasi yang menguntungkan diri sendiri.
3. *Genetic Regulatory System* (GRS) yakni sistem yang mengatur gen-gen makhluk hidup. Aplikasi KGS pada GRS ditujukan untuk keperluan pengolahan data dan analisa tingkah laku gen-gen dalam makhluk hidup pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mencegah atau meminimalkan munculnya gen-gen pembawa karakteristik buruk yang dapat berdampak pada kualitas hidup manusia.
4. *Probabilistic Cognitive Robot* yakni robot yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pengetahuannya melalui pembelajaran mengenai lingkungannya. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, robot mampu bergerak dengan cepat menuju sasaran dengan kepresisian arah dan gerakan yang tinggi. *Intelligent Unmanned Ground Vehicle* (I-UGV), *Intelligent Unmanned Underwater Vehicle* (I-UUV) dan *Intelligent Space Vehicle* (I-SV).

Untuk sesi ACEC2016, konferensi ini dihadiri oleh para pembicara dari 16 negara yakni Afrika Selatan, Colombia, Czech, Finlandia, Inggris, Korea Selatan, Macedonia, Malaysia, Maroko, Meksiko, Mesir, Polandia, Tunisia, Turki, Togo dan Yunani. Setiap penelitian yang disampaikan oleh masing-masing pembicara memiliki kekuatan ditinjau dari perspektif keilmuannya. Sesi ACEC2016 dipimpin oleh Prof. Dr. Dariusz Jacobzak dari Koszalin *University of Technology*, Polandia. Setelah melalui penjurian yang fair, makalah ilmiah dari Indonesia yang ditulis bersama oleh Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T. dan Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad, DEA ditetapkan sebagai makalah ilmiah terbaik dan memperoleh *Best Paper Award* pada forum ACEC2016. Kekuatan dari makalah ilmiah tersebut adalah perspektif baru pada bidang *Artificial Intelligence* yakni *Cognitive Artificial Intelligence*, dan hal ini merupakan jalur baru penelitian untuk menghasilkan sistem-sistem cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.

Keterlibatan Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T. pada konferensi-konferensi ilmiah internasional adalah bagian dari

kontribusinya kepada bangsa dan negara Indonesia melalui diseminasi penelitian ilmiah di berbagai kalangan di dunia internasional. Kaitannya dengan CAIRG ITB, Kolonel Lek Dr. Arwin telah bergabung dengan kelompok penelitian ini sejak tahun 1996 ketika masih bernama *Intelligent System Research Group* (ISRG) pada Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri ITB. ISRG diubah menjadi CAIRG pada 2007 dengan fokus pada penelitian-penelitian di bidang *Cognitive Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Tiruan Kognitif. Saat ini Kolonel Lek Dr. Arwin adalah senior *researcher* (peneliti senior) pada



Kolonel Lek. Dr. Arwin D.W. Sumari, ST, MT sedang memberikan paparan

CAIRG ITB dan juga menjadi Ko-Promotor dari mahasiswa S-3 ITB yang melaksanakan penelitian disertasi di laboratorium CAIRG ITB. Penelitian yang saat ini dilakukan adalah membangun rangkaian terintegrasi atau chip untuk KGS dan mengemasnya sebagai *System on Chip* (SoC).

Sebagai informasi, semua makalah ilmiah yang lulus seleksi ACEC 2016 telah dipublikasikan oleh the IRED melalui situs *SEEK Digital Library* dan dapat diunduh secara gratis di alamat http://seekdl.org/conferences_page_papers.php?confid=257.****



TELEVISI JANGAN HANYA SEBAGAI TONTONAN, TAPI JUGA HARUS MENJADI TUNTUNAN

Oleh : Desi

Televi merupakan salah satu media yang memiliki pengaruh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada era globalisasi ini. Tayangan Televi yang diharapkan dapat menjadi media yang mencerdaskan bangsa, saat ini mulai bergeser khususnya dalam nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Televi dewasa ini lebih banyak hanya menayangkan program-program yang menarik untuk diikuti dan ditonton, namun tidak mendidik. Tidak sedikit tayangan televi yang perlu dicermati sekaligus dikritisi. Hal tersebut penting dilakukan karena tayangan televi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik mengenai maksud, tujuan dan isi program yang ditayangkan.

Dilihat dari pentingnya kehadiran media massa di Indonesia, maka untuk meningkatkan peran televi sebagai media yang mencerdaskan bangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) mengadakan Seminar Nasional bekerja sama dengan salah satu stasiun televi swasta dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jabodetabek. Acara diselenggarakan pada 20 Desember 2016 dan bertempat di UHAMKA. Hadir sebagai narasumber adalah Deputi CEO salah satu stasun televi swasta Arya M. Sinulingga, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yulianto Darwis, Ph.D, dan Budayawan Radhar Panca Dahana.

Dalam acara tersebut Setjen Wantannas

diwakili oleh Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Kedepkatan Pengembangan Any Hindriatny, SH, M.Si, Kepala Bagian TU dan Protokol Drs. Daud Eda Bora dan Kasubbag Hubungan Media dan Publikasi. Desi Fajar Nita, S.Sos.

Partisipasi Setjen Wantannas dalam kegiatan Seminar Nasional ini adalah turut serta menyebarkan informasi mengenai pengaruh televi yang membawa dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat.

TELEVISI SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

Dalam perspektif demokrasi yang menjadi faktor terpenting adalah partai politik. Namun, media massa menjadi pilar demokrasi yang tidak kalah penting. Bahkan partai politik dan pilar demokrasi yang lain ada pada genggaman media massa. Jadi betapa pentingnya media massa baik cetak maupun elektronik sehingga menjadi penentu kebijakan serta masa depan bangsa dan negara. Media massalah yang memberikan warna dan menentukan arah perjalanan bangsa terutama pada generasi yang akan datang. Bahkan kalau kita perhatikan, para tokoh politik nasional kita besar karena media massa.

Sebagai pilar demokrasi, media massa mempunyai kebebasan yang luar biasa. Media seperti televi mampu memberikan informasi yang tidak mudah dihapus dan menjadi wacana bagi masyarakat. Terlebih lagi apa yang diucapkan oleh

Media *mainstream*, menjadi seperti undang-undang bagi masyarakat. Kita berharap media *mainstream* tidak hanya sekedar memberikan tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan dan bagian dari pendidikan yang mencerahkan dan mencerdaskan, karena banyak media yang hanya menjadi tontonan saja dan tidak mendidik. Sekadar mencari keuntungan bagi para pemilik stasiun televisi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan bahwa survey indeks kualitas kita masih rendah (program sinetron 2,96%, program wisata budaya 4, 15%). Pernyataan ini jelas dan nyata menunjukkan kalau televisi di Indonesia memang belum secara optimal menjadi media yang dapat mencerdaskan bangsa.

Sebagai bagian dari pilar demokrasi, kaitannya dengan aspek budaya, kekuatan peradaban menjadi unsur penting. Tidak sedikit tayangan televisi memiliki rating yang tinggi, tapi isinya tidak mengandung unsur pendidikan atau hanya sedikit saja mengandung unsur pendidikan. Televisi seperti ini sudah jelas tidak mencerdaskan umat manusia. Inilah yang dapat dipastikan sebagai penyebab hancurnya peradaban. Namun, tidak dipungkiri peradaban bisa naik juga karena media massa.

Diperlukan peran budayawan untuk mempertahankan peradaban semacam ini. Ada baiknya instrument budaya dan instrument pendidikan dipadukan menjadi suatu komitmen dan identitas dalam mengembangkan fungsi dan manfaat dari pertelevisian di Indonesia.

PERAN KOMISI PENYIARAN PUSAT (KPI)

KPI sebagai Lembaga Negara yang bersifat independen merupakan wakil publik dibidang penyiaran. KPI menjalankan fungsi sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hal penyiaran. KPI mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan menjamin pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan publik. Otentitas media penyiaran berbeda dengan media cetak.

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan apabila kita sudah memproduksi sebuah isi siaran, artinya kita sudah menggunakan frekuensi publik. Oleh karena itu, kita harus tahu dan hormat pada publik. Inilah yang menjadikan KPI memposisikan diri sebagai wasit atau penyeimbang dari media dan kepentingan publik. Akibatnya setiap siaran mempunyai konsekuensi sanksi hukum. Pada media cetak, sanksi hukum atas kesalahan penyampaian informasi hanya berupa perbaikan secara internal atau permohonan maaf. Namun, dalam penyiaran publik, ini merupakan amanah dari UU bahwa ini adalah hak publik dan harus diberikan kepada publik. Disinilah fungsi KPI sebagai penyeimbang.

PERAN TELEVISI DI MASYARAKAT

Pengaruh baik bagi dan buruk media massa terhadap kehidupan masyarakat memang banyak ditemukan. Terlebih di zaman sekarang ini, dunia bisnis seakan menjadi nomer satu di jagat raya khususnya Indonesia.

Money minded dan *money oriented* merasuk di seluruh lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri televisi juga menjadi salah satu ladang untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para pemilik dan investornya. Segala cara akan dilakukan demi tercapainya tujuan.

Budayawan Radhar Panca Dahana berpendapat bahwa dalam situasi global seperti itu sebuah bangsa turut mengembangkan industri dan budaya media massanya. Mencoba menetapkan



posisi dan fungsi yang masih dalam “paradigma” tradisional, dalam karakter, bentuk atau jenis, juga visi dan tujuan tradisional. Jika diperhatikan, media massa nasional ataupun daerah yang masih mengacu pada genre, gaya, dan filosofi pada era 1970-an yaitu generasi kedua media massa yang berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Dari sekian banyak media komunikasi yang diakibatkan tingginya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini, media televisi tanpa disadari merupakan media komunikasi yang paling unggul mendominasi persepsi, sikap dan tingkah laku si penerima pesan.

Masih menurut Radhar bahwa saat ini telah terjadi eksploitasi dalam industri televisi di Indonesia, hal ini kadang menyampingkan nilai-nilai budaya dan kebangsaan kita. Semua hanya mengejar rating dan komersialitas semata atas nama kepentingan bisnis dan keuntungan.

Kegiatan Seminar Nasional ini menyimpulkan betapa pentingnya peranan dari pelbagai pihak dalam mendorong media massa khususnya televisi agar benar-benar mampu menjalankan fungsinya dalam mencerdaskan bangsa.****



Ronaldo Pemenang Ballon d'Or 2016

Oleh: dr. Riswandi

Bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, merengkuh gelar *Ballon d'Or* 2016. Pada edisi kali ini, Ronaldo mengalahkan dua rivalnya yang sama-sama bermain di La Liga, Lionel Messi (Barcelona) dan Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

Ini adalah trofi keempat Ronaldo dari ajang tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun asal Portugal ini menjadi pemenang pada penghargaan edisi 2008, 2013 dan 2014. Dengan demikian, hanya Ronaldo dan Messi yang bisa memenangi trofi ini sebanyak empat kali (Messi bahkan sudah 5 kali).

Hasil tersebut memang sudah diprediksi karena tahun 2016 benar-benar milik Ronaldo. Sebab, mantan bintang *Manchester United* ini meraih dua gelar paling bergengsi di Eropa, yakni *Liga Champions* bersama Real Madrid dan membawa Portugal juara Piala Eropa.

"Ini merupakan momen spesial. Itu artinya segala pengorbananku tidak sia-sia. Saya merasa sangat bahagia memenangi ini. Saya sudah bekerja sangat keras," ujar Ronaldo saat menerima penghargaan, melalui tayangan video.

"Banyak orang yang membantuku untuk berada di sini, dan tidak mudah berdiri di sini. Anda bisa mengandalkan satu pemain yang mempertahankan levelnya setiap tahun. Saya salah satu dari mereka dan itu membuatku bangga."

Memang, pencapaian individu Ronaldo sepanjang 2016 berbanding lurus dengan prestasi klub dan negaranya. Total, Ronaldo mencetak 51 gol dalam 54 pertandingan bersama Real Madrid dan mengemas 13 gol bagi Portugal. Ini merupakan yang tertinggi dalam kariernya untuk satu tahun kalender. Meskipun demikian, torehan 31 gol La Liga gagal membawa Ronaldo menjadi top *scorer* musim lalu, yang menjadi milik Luis Suarez. *Striker*

Barcelona ini menyabet gelar *el pichichi* alias pencetak gol terbanyak Spanyol dan Eropa karena mengemas 40 gol. Suarez harus puas berada di urutan keempat ajang Ballon d'Or ini.

"Ini menjadi tahun terbaik dalam kariernya, baik untuk level tim maupun individu," ujar Ronaldo. "Sebelumnya, memenangi gelar bagi Portugal merupakan satu-satunya yang tersisa dalam kariernya dan itu adalah momen terpenting. Memenangi gelar Liga Champions bersama Real Madrid pun sangat membanggakan."

"Merupakan penghormatan yang besar memenangi *Ballon d'Or*. Saya sangat bahagia. Ini mimpi menjadi kenyataan dan yang keempat bagiku. Saya merasa sangat bangga. Kemenangan ini bagi rekan-rekan setimku, baik di klub maupun tim nasional. Luar biasa memenangi lagi trofi ini."

Sementara itu Messi, yang untuk keempat kalinya menjadi *runner-up* dalam kariernya, juga memiliki prestasi yang cukup bagus selama 2016. Peraih *Ballon d'Or* 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2015 ini meraih gelar *La Liga* dan *Copa del Rey* bersama Barcelona dan membantu Argentina mencapai final *Copa America Centenario*.

Sedangkan Griezmann, yang harus puas menempati urutan ketiga, membuat kejutan ketika menjadi top *scorer* Piala Eropa 2016. Dia pun membantu Prancis menembus partai puncak sebelum ditaklukkan Portugal. Griezmann pun ikut memberikan andil bagi Atletico Madrid mencapai final *Liga Champions* sebelum kalah adu penalti melawan Real Madrid.

Persaingan tiga pemain ini belum berakhir. Sebab, setelah ajang *Ballon d'Or* ini, mereka kembali bertemu pada ajang *FIFA World Player of the Year Event* yang pada tahun-tahun sebelumnya digabung dengan *Ballon d'Or* ini akan dilaksanakan pada 9 Januari 2017 di Zurich, Swiss. ****

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Oleh : Dimas Ariyoso



Sumber foto : Sekretariat Negara



**“Selamat siang, saya Ari mahasiswa dari Universitas XYZ, saya membutuhkan data untuk penelitian skripsi saya mengenai anggaran di Kementerian Bapak, kebetulan saya mengambil tema besar penelitian mengenai Keuangan Negara”
“Oh, maaf Dik, itu tidak bisa diberikan, itu rahasia dapur kami”**

Mungkin sepenggal percakapan tadi sangat lumrah kita dengar beberapa tahun silam, transparansi dan keterbukaan menjadi hal yang tabu untuk diketahui banyak orang terutama masyarakat yang ingin mengetahui kinerja dan transparansi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) karena belum sepenuhnya mau membuka diri dalam transparansi pengelolaan anggaran.

Keterbukaan informasi bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan Komunikasi, segala akses informasi dapat dengan mudah didapatkan melalui berbagai saluran media komunikasi yang semakin bervariasi. Tentunya, ada proses panjang dibalik kemudahan yang telah kita rasakan saat ini.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi telah melewati berbagai fase pemerintahan dan kepemimpinan, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan era Reformasi hingga saat ini.

Perjalanan demokrasi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengarah ke arah demokrasi yang lebih baik, sering kita mendengar makna dari demokrasi itu sendiri secara harfiah “dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Keterbukaan informasi dalam bingkai demokrasi merupakan sebuah ruang bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam mendapatkan akses informasi terkait kebijakan dan anggaran pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Terdapat pengawasan atau kontrol bagi kinerja pemerintah oleh rakyat, sehingga kepentingan untuk rakyat dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah.

DI INDONESIA, KETERBUKAAN INFORMASI DIJAMIN

Untuk kebebasan rakyat dalam mendapatkan informasi telah dijamin di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 (f) yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Tentunya dengan peran aktif dari masyarakat dalam mengakses informasi publik dapat turut mengawasi kinerja pemerintahan, sehingga akan mendorong terciptanya *clean and good government* atau pemerintahan yang bersih

Dan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah melakukan sebuah komitmen untuk turut serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan inovatif melalui *Open Government Indonesia* (OGI).

Disamping itu, keterbukaan informasi di Indonesia juga diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dari UU ini lahirlah sebuah lembaga yang independen dalam mengawasi dan mengimplementasikan keterbukaan informasi yaitu Komisi Informasi (KI).

PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Akhir 2016, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2016 KI menggelar acara penghargaan KIP di Istana Wapres RI, acara dibuka secara langsung oleh Wapres Jusuf Kalla dan turut dihadiri juga oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta beberapa Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan juga Ketua KI Pusat John Fresly.

Dalam sambutan penganugerahan KIP, Wapres Jusuf Kalla mengucapkan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemenang. Menurutnya, badan publik terutama Kementerian sangat penting untuk menjamin keterbukaan informasi. Hal tersebut perlu dilakukan

karena informasi adalah hak warga masyarakat, “Yang terpenting bagaimana masyarakat mengetahui perencanaan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana evaluasi daripada tugas-tugas yang diberikan kepada mereka semuanya,”ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla juga menuturkan bahwa keterbukaan informasi harus selalu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat tentang Pemerintah atau lembaga lain serta program-programnya menjadi lebih luas, “Tujuannya ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama, karena Pemerintah, Presiden tidak mungkin menyampaikan semua hal kepada masyarakat. Tapi masing-masing penugasan memberikan tanggung jawab dan informasi apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,”

HASIL PEMERINGKATAN

Ketua KIP John Fresly dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi badan publik dalam kegiatan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika pada tahun 2015 partisipasi badan publik yang mengikuti pemeringkatan sebesar 47%, maka pada tahun 2016 partisipasinya mencapai 51%.

Adapun hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016, adalah sebagai berikut:

HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kategori Badan Publik Kementerian		Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)		Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural (LNS)	
1	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	95,87	1	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	96,67
2	Kementerian Keuangan	95,48	2	Mahkamah Konstitusi	94,54
3	Kementerian Perindustrian	94,41	3	BPKP	93,81
4	Kementerian Perhubungan	92,74	4	Bank Indonesia	93,54
5	Kementerian PAN dan RB	92,06	5	Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	91,41
6	Kementerian Sekretariat Negara	91,97	6	Badan Tenaga Nuklir Nasional	89,09
7	Kementerian Pertanian	90,31	7	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	89,02
8	Kementerian PPN/Bappenas	86,92	8	LAPAN	88,75
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	85,82	9	Komis Yudisial	86,44
10	Kementerian Kesehatan	84,16	10	LKP Barang/Jasa Pemerintah	84,39
			1	Komisi Pemberantasan Korupsi	86,87
			2	PPATK	86,74
			3	Komisi Pemilihan Umum	77,02
			4	BP wilayah Surabaya-Madura	68,82
			5	Badan Pengawas Pemilihan Umum	66,77
			6	BPKPB dan Pelabuhan Bebas Batam	62,90
			7	Komisi Kepolisian Nasional	58,20
			8	Komnas HAM	49,34
			9	Ombudsman Republik Indonesia	47,69
			10	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	43,68

- Metode penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) ke seluruh Badan Publik
- Kategori yang tadi ditampilkan dalam tabel dapat dilihat pada www.setneg.go.id
- Tabel diolah oleh Malajah Catra -Wantannas



KOMISIINFORMASI.GO.ID

Sumber : Sekretariat Negara RI

BENARKAH PERALATAN MAKAN DARI PLASTIK BERBAHAYA?



Oleh : Kurnia Yuniarti

Manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Masing-masing memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa pakaian yang baik, kita akan merasa malu bertemu dengan orang lain. Kita tidak bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum. Rumah menjadi tempat berlindung dari dinginnya hujan dan petir serta panasnya matahari.

Orang tua dan kakek nenek kita terbiasa menggunakan peralatan makan yang berasal dari gelas karena saat itu peralatan dari plastik belum berkembang seperti sekarang ini. Peralatan makan dari plastik baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Sejak itu perkembangannya bisa dibilang pesat dan memiliki banyak peminat. Saat ini orang-orang lebih menyukai wadah dari plastik karena ringan, mudah dibawa, dan memiliki berbagai pilihan warna dan ukuran sesuai kebutuhan.

Beberapa tahun terakhir media ramai memberitakan tentang bahaya peralatan makan yang mengandung melamin. Hal ini tentu membuat khawatir ibu rumah tangga yang sering menggunakan piring dan gelas plastik. Mereka tidak ingin mengorbankan kesehatan anggota keluarganya. Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi karena pemerintah telah mengeluarkan kode plastik yang aman digunakan sebagai kemasan pangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2010 Pasal 2, setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri atau impor wajib mencantumkan kode dan logo daur ulang. Kode ini bisa dilihat di bagian bawah piring, mangkok, atau piring. Logo tara pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.

Kode 01, PET, memiliki sifat jernih, kuat, tahan pelarut, kedap gas dan air, serta melunak pada suhu 80°C. Jenis kemasan ini relatif aman untuk sekali pakai sebagai kemasan pangan.

Kode 02, HDPE, merupakan polimer yang sifatnya keras hingga semi fleksibel, tahan terhadap bahan kimia dan kelembapan, mudah diwarnai, diproses, dan dibentuk, serta melunak pada suhu 75°C. Relatif aman sebagai kemasan pangan.

Kode 03, Kemasan dari PVC, bersifat kuat, keras, jernih, dan melunak pada suhu 80°C. Sebaiknya kita menggunakan alternatif pembungkus makanan lain karena kandungan yang ada di dalamnya dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak jika dipanaskan.

Kode 04, jenis plastik LDPE, memiliki sifat mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, tidak jernih tetapi tidak tembus cahaya, dan melunak pada suhu 70°C. Jenis ini juga relatif aman sebagai kemasan pangan.

Kode 05, polimer PP, bersifat keras tapi fleksibel, kuat, tidak jernih tapi tembus cahaya, tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak, serta melunak pada suhu 140°C. Kemasan pangan yg aman digunakan pada suhu panas.

Kode 06, PS, memiliki sifat getas, ada yang jernih seperti kaca, ada yang berwarna putih, serta terpengaruh lemak dan pelarut. Perlu diwaspadai adanya residu monomer stirena yang bersifat karsinogenik.

Terakhir, kemasan plastik lain (salah satunya Polikarbonat) dengan kode 07 yang bersifat keras, jernih, dan secara termal sangat stabil. Perlu diwaspadai adanya sisa bahan dasar bisfenol-A (BPA) pada polimer ini yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin.

Mungkin akan merepotkan jika kita memperhatikan bagian bawah peralatan makan saat berbelanja, tetapi ini dapat melindungi keluarga kita dari keracunan plastik.**** (Sumber : BPOM RI)

SIMBOL DAN JENIS POLYMER

POLIETILENA TEREFTALAT



PET

HDPE



PE-HD

POLIVINIL KLORIDA



PVC

LDPE



PE-LD

POLIPROPILEN



PP

POLISTIREN



PS

LAIN-LAIN



O

Sumber gambar: Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2/2010



Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI
Senin (23/01/2017)



Paparan tentang Keamanan Jaringan (*Network Security*)
bersama AIRIN Jumat (13/01/2017)



Sesjen Wantannas dan Karo POK menghadiri
Milsim 2017 Senin (16/01/2017)



Sesjen Wantannas bersama Narasumber dari WRA
dalam kegiatan Rapat Koordinasi dengan WRA



Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal, Brigjen TNI Firman Achmadi, SE
memimpin Rapat Pembahasan Anggaran, Selasa (17/01/2017)



Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

10 JANUARI 2016



HARI GERAKAN SATU JUTA POHON